

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA MEDAN 2023



<https://medan>



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA MEDAN 2023



Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan 2023

ISSN : 3025-7298
No. Publikasi : 12750.2339
Katalog : 4102002.1275

Ukuran Buku : 17,6 X 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 72 halaman

Naskah :
BPS Kota Medan

Penyunting :
BPS Kota Medan

Desain Kover oleh :
BPS Kota Medan

Penerbit :
BPS Kota Medan

Sumber Ilustrasi : *freepik.com*

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum :
Suri Juwita Ananda, S.E., M.Si.

Penanggung Jawab Teknis :
Ragdad Cani Miranti, SST, M.A

Penyunting :
Ragdad Cani Miranti, SST, M.A.

Penyusun Naskah :
Rosdiana Sirait, S.Si.

Tata Letak :
Rosdiana Sirait, S.Si.

Infografis :
Ragdad Cani Miranti, SST, M.A

Desain Kover oleh :
Ragdad Cani Miranti, SST, M.A

Kata Pengantar

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan 2023 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kota Medan. Publikasi ini menyajikan angka IPM Kota Medan dan perbandingannya dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Utara serta dilengkapi dengan komponen pembentuk IPM yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang mengukur kinerja pembangunan, yang digunakan untuk mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.

Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik secara resmi menghitung IPM dengan metode baru. Untuk menjaga kesinambungan series angka IPM metode baru, maka dilakukan back casting IPM tahun 2010 sampai dengan 2013. Publikasi ini menampilkan data runtun waktu mengenai perkembangan pembangunan manusia di Kota Medan.

Semoga publikasi capaian pembangunan manusia Kota Medan yang berjudul “Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan 2023” ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat terwujud. Dan semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan.

Medan, Desember 2023

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Medan



Suri Juwita Ananda, S.E., M.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	xi
Bab 1 Gagasan Pembangunan Manusia	1
1.1 Ide Dasar	3
1.2 Definisi Pembangunan Manusia	4
1.3 Mengukur Pembangunan Manusia	5
1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
Bab 2 Inovasi dalam Pengukuran Pembangunan Manusia	9
2.1 Perjalanan Penghitungan IPM	11
2.2 Perubahan Metodologi IPM	13
2.3 Komponen IPM	18
2.4 Penyusunan IPM	22
Bab 3 Status Pembangunan Manusia	25
3.1 Status Pembangunan Manusia Kota Medan	27
3.2 Posisi Kota Medan	28
3.3 Status Pembangunan Manusia di Medan	32
Bab 4 Kemajuan Pembangunan Manusia	37
4.1 Tren Terbaru Pembangunan Manusia melalui Lensa IPM	39
4.2 Lompatan Status Pembangunan Manusia	40
4.3 Hidup Lebih Lama, Kesehatan yang Lebih Baik	41
4.4 Pendidikan Memperluas Peluang	43
4.5 Kenaikan Standar Hidup	46
Bab 5 Disparitas Pembangunan Manusia di Sumatera Utara	49

5.1	Gambaran Umum Wilayah Sumatera Utara	51
5.2	Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kawasan Pantai Barat, Dataran Tinggi, Pantai Timur, dan Wilayah Kepulauan	52
5.3	Kesenjangan Pembangunan Manusia di Kota Medan	54
5.4	Kesenjangan Pembangunan Manusia antara Kabupaten dan Kota.....	59
LAMPIRAN		65

<https://medankota.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP	12
Gambar 3.1	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Sumatera, 2023	28
Gambar 3.2	Angka Harapan Hidup Provinsi di Pulau Sumatera, 2023	29
Gambar 3.3	Harapan Lama Sekolah Provinsi di Pulau Sumatera, 2023	30
Gambar 3.4	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi di Pulau Sumatera, 2023	30
Gambar 3.5	Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan) Provinsi di Pulau Sumatera, 2023	31
Gambar 3.6	IPM Kota Medan menurut Kabupaten Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2023	33
Gambar 3.7	Persentase Status Pembangunan Manusia di Kota Medan, 2023	34
Gambar 4.1	Perkembangan IPM Kota Medan, 2020-2023	39
Gambar 4.2	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Medan, 2020-2023	41
Gambar 4.3	Umur Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2023	42
Gambar 4.4	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Medan, 2020-2023	44
Gambar 4.5	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2023	44
Gambar 4.6	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2023	45
Gambar 4.7	Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun Kota Medan, 2020-2023 (juta rupiah)	46
Gambar 4.8	Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2023 (juta rupiah)	47

Daftar Gambar

Gambar 5.1	IPM Tertinggi dan Terendah menurut Kawasan di Kota Medan, 2023	53
Gambar 5.2	Perkembangan Selisih IPM Tertinggi dengan Terendah di Kota Medan, 2020-2023	55
Gambar 5.3	Perkembangan Selisih AHH Tertinggi dengan Terendah di Kota Medan, 2020-2023	55
Gambar 5.4	Perkembangan Selisih HLS Tertinggi dengan Terendah di Kota Medan, 2020-2023	56
Gambar 5.5	Perkembangan Selisih RLS Tertinggi dengan Terendah di Kota Medan, 2020-2023	57
Gambar 5.6	Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita Tertinggi dengan Terendah di Kota Medan, 2020-2023.....	58
Gambar 5.7	IPM Kota Medan menurut Tertinggi dan Terendah, 2023	59
Gambar 5.8	Perbandingan IPM di Kota Medan menurut Status IPM, 2023	60

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik	14
Tabel 2.2	Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP	15
Tabel 2.3	Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)	21
Tabel 2.4	Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM	22
Tabel 3.1	Klasifikasi Status Pembangunan Manusia	27
Tabel 4.1	Kabupaten/Kota dengan Perkembangan Tercepat dalam Pembangunan Manusia di Sumatera Utara, 2020-2023	40
Tabel 4.2	Perubahan Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020-2023	40
Tabel 5.1	Penggolongan di Kota Medan menurut Wilayah	51
Tabel 5.2	Persentase Status IPM di Kota Medan Menurut Kawasan, 2023	54



BAB 1

GAGASAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Dimensi IPM dan Indikatornya

Kesehatan

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)

Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah

Standar Hidup

Pengeluaran Riil per Kapita

Layak

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran umum pencapaian pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah.

BAB 1

GAGASAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1.1 Ide Dasar

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang”. (Human Development Report 1990).

Kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) edisi pertama yang dipublikasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia. Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat pembangunan, karena manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan manusia, akan membuat suatu daerah tertinggal dari daerah lain. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan manusia akan memberikan manfaat dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Konsep pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), pembangunan manusia salah satunya berupa suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*“aprocess of enlarging people’s choices”*).

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain meliputi kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah atau negara.

1.2 Definisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tiga pilihan yang paling mendasar, yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Selain tiga pilihan dasar tersebut, juga terdapat pilihan lainnya atau pilihan tambahan. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati hargadiri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia (*HDR 1990 halaman 10*).

1.3 Mengukur Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, yang populer pembangunan manusia. Dalam sistem pengukuran dan monitoring pembangunan manusia, idealnya mencakup variabel inti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Variabel tersebut menerangkan sebagian besar data/indikator yang menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia.

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*. Alat ukur ini diluncurkan oleh *Mahbub ul Haq* dalam bukunya yang berjudul *Reflections on Human Development* (1995), dan telah disepakati dunia melalui *United Nation Development Programe* (UNDP).

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

Gagasan Pembangunan Manusia

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, yang dicerminkan dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan. Strategi tersebut yaitu peningkatan pendapatan perkapita yang sekaligus penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (melalui percepatan investasi). Strategi bidang pendidikan, yang dapat dikembangkan yaitu peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang didukung oleh pemantapan pelaksanaan pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai wajib belajar 12 tahun. Strategi lainnya yaitu pengembangan lembaga jaminan sosial, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak, penurunan kesenjangan antar daerah serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran umum dari pencapaian pembangunan dan penentuan prioritas-prioritasnya yang dicapai oleh suatu wilayah. Pencapaian pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang berwawasan manusia yaitu pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat yang komponennya meliputi tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, tenaga kerja (*employment*), kesehatan dan lain-lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Publikasi ini secara umum menyajikan data dan analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan metode baru selama periode 2014-2022. Untuk melihat perkembangan IPM secara lebih utuh, menyajikan kondisi sosial ekonomi,

perkembangan IPM dan komponennya, serta perbandingan kemajuan pembangunan manusia dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara.

Publikasi ini terdiri dari lima bab. Bab 1 menyajikan ide dasar penulisan yang menguraikan manfaat peningkatan kualitas modal manusia dalam pembangunan daerah. Inovasi dalam pengukuran pembangunan manusia akan disajikan pada Bab 2, yaitu bab yang menguraikan tentang perubahan metodologi IPM metode baru. Selanjutnya pada Bab 3 akan disajikan status pembangunan manusia Kota Medan. Kemajuan pembangunan Kota Medan akan disajikan pada Bab 4 beserta analisis dan pembahasan secara deskriptif. Terakhir, Bab 5 yang menguraikan disparitas pembangunan manusia di wilayah Sumatera Utara.

BAB 2

INOVASI DALAM PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Indikator Pengeluaran

Pengeluaran Riil per kapita disesuaikan (27 komoditas)

Indikator Pendidikan

- Angka Melek Huruf
- Rata-rata Lama Sekolah (15+)

Metode Penghitungan

- Rata-rata Aritmatik
- Reduksi shortfall

Metode lama

Indikator Pengeluaran

Pengeluaran Riil per kapita 96 komoditas

Indikator Pendidikan

- Harapan Lama Sekolah
- Rata-rata Lama Sekolah (15+)

Metode Penghitungan

- Rata-rata Geometrik
- Pertumbuhan Aritmatik

Metode baru



BAB 2

INOVASI DALAM PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1 Perjalanan Penghitungan IPM

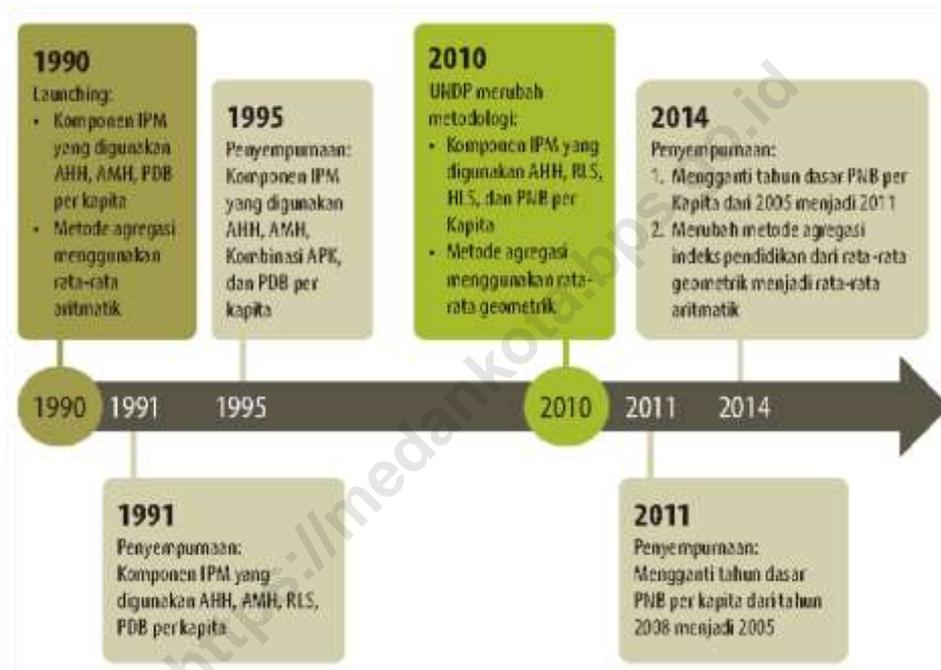
Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat banyak sorotan. Banyak dukungan yang mengalir, tetapi tidak sedikit kritikan terhadap indikator ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa indikator yang tercakup di dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Para pakar terus bekerja untuk mendalami lebih jauh tentang pembangunan manusia. Mereka terus melakukan kajian untuk menyempurnakan penghitungan IPM. Hal itu terutama dilakukan pada indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan di tahun 2010.

Awalnya, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia. Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, mereka menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*). Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Karena terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup

relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP



Catatan:

AHH : Angka Harapan Hidup saat Lahir
 AMH : Angka Melek Huruf
 RLS : Rata-rata Lama Sekolah
 PDB : Produk Domestik Bruto

APK : Angka Partisipasi Kasar
 HLS : Harapan Lama Sekolah
 PNB : Produk Nasional Bruto

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah.

Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2015. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Metode agregasi indeks pendidikan diubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan untuk membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

2.2 Perubahan Metodologi IPM

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM diperkuat oleh dua hal mendasar. **Pertama**, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM.

Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antarwilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk

lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Perumpamaan sederhana untuk dapat melihat kelemahan rata-rata aritmatik misalnya dengan menghitung secara sederhana nilai ketiga dimensi pembangunan manusia.

Tabel 2.1 Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik

Kesehatan	Pendidikan	Standar Hidup Layak	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik
3	3	3	3,00	3,00
2	3	4	3,00	2,88
1	3	5	3,00	2,47

Misal, capaian dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup masing-masing adalah 3, 3, dan 3. Dengan rata-rata aritmatik dapat diperoleh dengan mudah bahwa rata-rata ketiga dimensi adalah $(3 + 3 + 3) / 3 = 3$. Pada contoh kasus lain, misalkan capaian ketiga dimensi berturut-turut adalah 2, 3, dan 4. Rata-rata ketiga dimensi juga masih 3, yaitu $(2 + 3 + 4) / 3 = 3$. Padahal secara nyata terlihat bahwa ada ketimpangan capaian antardimensi pembangunan manusia.

Pada kasus yang lebih ekstrim, rata-rata aritmatik mampu menutupi ketimpangan pembangunan manusia yang terjadi di suatu wilayah. Misal, capaian ketiga dimensi secara berturut-turut menjadi 1, 3, dan 5. Dalam kondisi ketimpangan yang ekstrim ini, rata-rata pembangunan manusia tetap 3. Kondisi ini sama dengan capaian suatu wilayah pada contoh kasus pertama. Rata-rata aritmatik menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Tabel 2.2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Umur Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Umur Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Melek Huruf (AMH) • Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan Lama Sekolah (HLS) • Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Berbeda pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama.



Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM. **Pertama**, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antardimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia, yaitu:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Long Form SP2020, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

2.3 Komponen IPM

a. Angka Harapan Hidup saat Lahir

Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat, namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, maka UNDP memilih indikator Angka Harapan Hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) sebagai salah satu komponen untuk penghitungan IPM. Angka harapan hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*).

Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan data hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

b. Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Indikator harapan lama sekolah merupakan indikator baru menggantikan

angka melek huruf. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

b.1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

b.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan

UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

c. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan. Indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita, namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Saat ini BPS masih menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (1)$$

Ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (*purcashing power parity*) yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 2.3. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel 2.4. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Tabel 2.3 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cinca ng	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikang (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Roko kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

2.4 Penyusunan IPM

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} \quad (4)$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} - I_{minRLS}}{2} \quad (5)$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{maxmin})}{\ln(pengeluaran_{max}) - \ln(pengeluaran_{maxmin})} \quad (6)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel L2.

Tabel 2.4 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \quad (7)$$

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan *reduksi short fall*. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.

Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\% \quad (7)$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

BAB 3

KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA



Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan Tahun 2023 menempati urutan pertama di Sumatera Utara sebesar 82,61 poin.



BAB 3

STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

3.1 Status Pembangunan Manusia Kota Medan

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri maka hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan atau pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah seperti kabupaten/kota atau provinsi serta perbandingannya dengan pencapaian di wilayah lain juga dapat dianalisis.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 3.1 Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan mencapai 82,61 pada tahun 2023. Dengan capaian IPM itu, Kota Medan berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “sangat tinggi”. Tidak hanya itu, capaian ini juga sekaligus mengantarkan Kota Medan pada posisi pertama dari 33 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Sumatera Utara.

Capaian IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup di Kota Medan pada tahun 2023 mencapai usia 74,76 tahun.

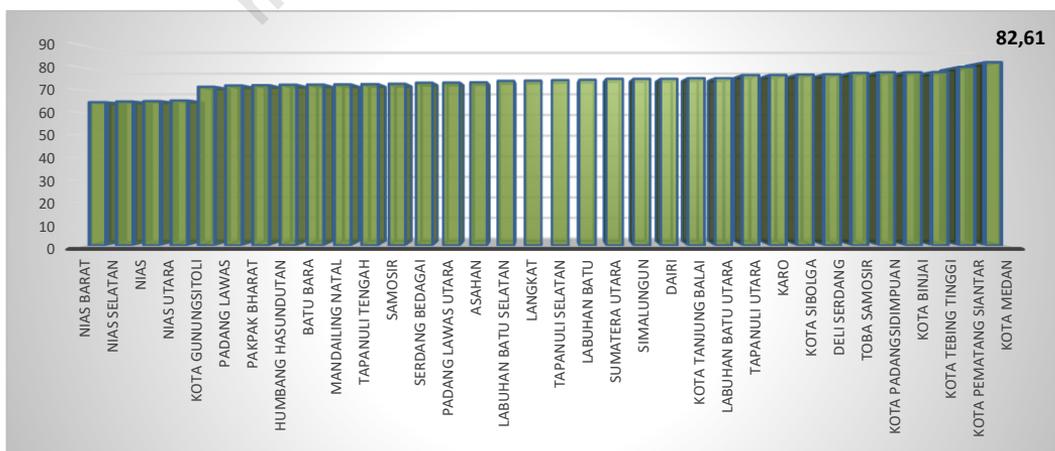
Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun ke atas di Kota Medan telah menempuh pendidikan hingga 11,62 tahun atau setara dengan mencapai SMA kelas 2. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 14,78 tahun atau mencapai Diploma III.

Tidak kalah penting yaitu dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan di Kota Medan sebesar 15,674 juta rupiah per tahun pada tahun 2023.

3.2 Posisi Kota Medan

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan berada pada posisi pertama dari 33 kabupaten/kota lainnya. Dengan angka IPM tertinggi di Sumatera Utara, status pembangunan manusia ibukota Provinsi Sumatera Utara tersebut telah masuk pada kategori “sangat tinggi”.

3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2023

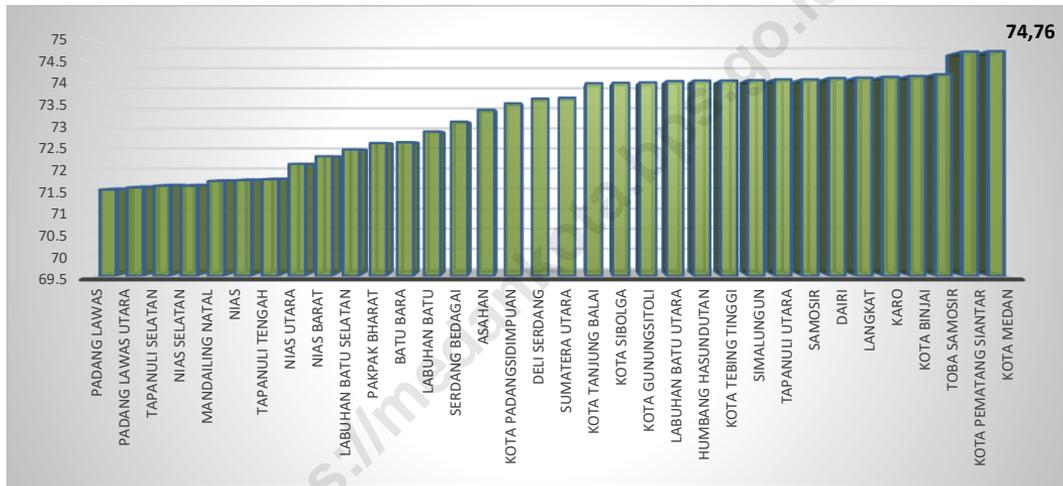


IPM Kota Medan tahun 2023 sebesar 82,61, peringkat pertama dan berada diatas angka IPM Provinsi Sumatera Utara yang hanya sebesar 75,13.

a. Umur Harapan Hidup

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup (UHH) saat lahir. Umur harapan hidup Kota Medan tahun 2023 yaitu 74,76 tahun, masih diatas angka Sumatera Utara yang hanya 73,67 tahun. UHH Kota Medan berada di urutan pertama dari 33 kabupaten/kota lainnya.

Gambar 3.2 Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2023

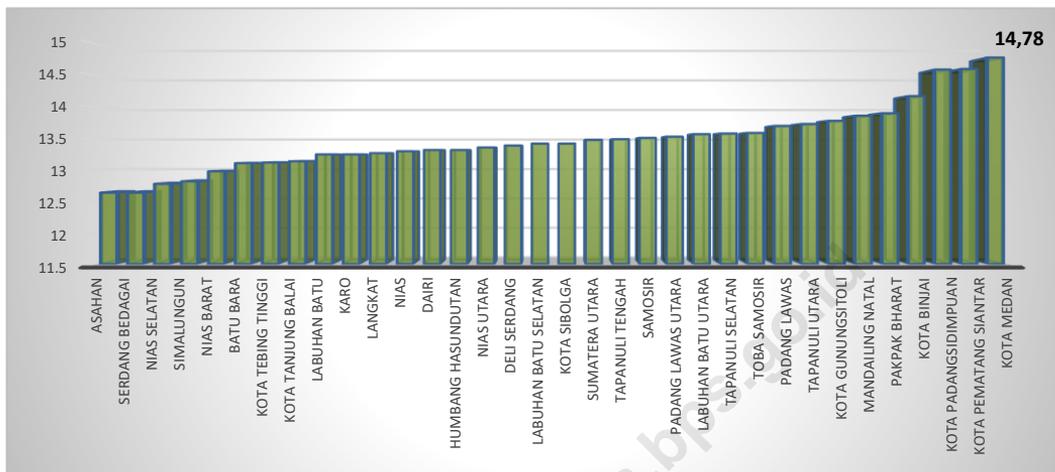


Dari seluruh kabupaten/kota yang ada, sebanyak 17 kabupaten/kota memiliki umur harapan hidup dibawah Sumatera Utara dengan umur harapan hidup terendah adalah Kabupaten Padang Lawas yaitu sebesar 71,52 tahun. Sisanya sebanyak 16 kabupaten/kota memiliki umur harapan hidup diatas Sumatera Utara dengan umur harapan hidup tertinggi yaitu Kota Medan yang mencapai 74,76 tahun.

b. Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah

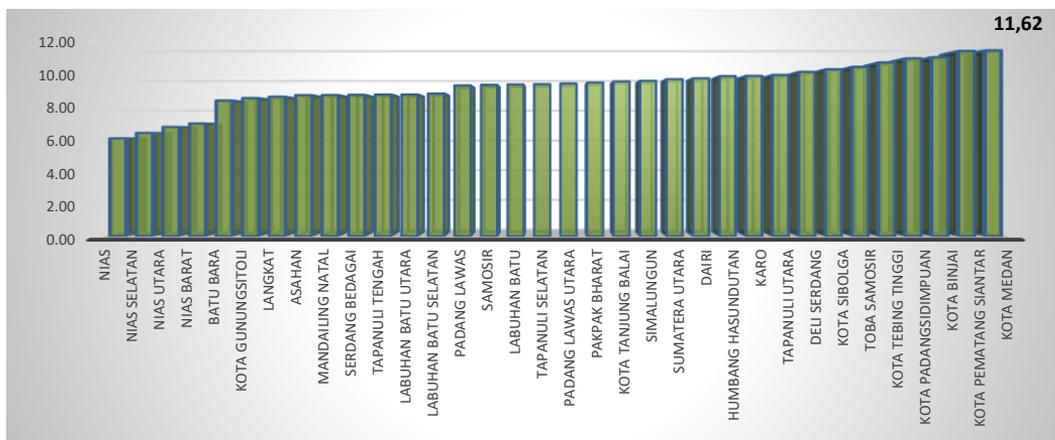
Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (HLS). Harapan Lama Sekolah Kota Medan mencapai 14,78 tahun. Meski lebih tinggi dibandingkan Sumatera Utara dengan HLS sebesar 13,48 tahun namun harapan lama sekolah di Kota Medan tetap perlu terus ditingkatkan. HLS Kota Medan berada di urutan pertama di Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 3.3 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2023



Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara, harapan lama sekolah Kota Medan tahun 2023 bersama empat belas kabupaten/kota lainnya berada diatas HLS Provinsi Sumatera Utara dengan HLS tertinggi di Kota Medan dengan HLS mencapai 14,78 tahun. Sementara delapan belas kabupaten/kota lain berada dibawah HLS Sumatera Utara dengan HLS terendah di Kabupaten Serdang Bedagai yang hanya sebesar 12,64 tahun.

Gambar 3.4 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2023



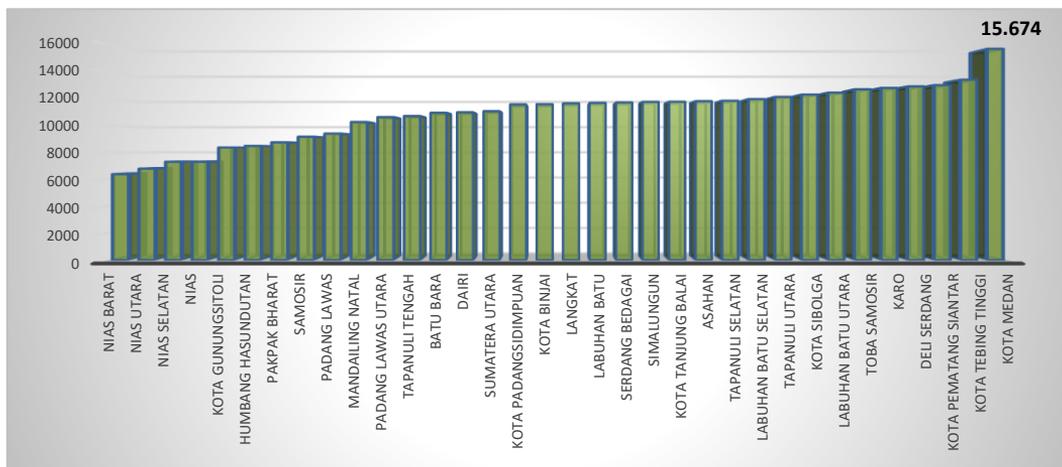
Masih dalam dimensi pengetahuan, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Medan bersekolah selama 11,62 tahun atau mencapai SMU kelas III pada tahun 2023. Rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Medan cukup tinggi dibandingkan Sumatera Utara yang hanya 9,82 tahun. Hasil yang cukup menggembirakan, RLS Kota Medan berada di urutan pertama di Sumatera Utara.

Dibandingkan RLS Sumatera Utara, Kota Medan bersama sebelas kabupaten/kota lainnya berada di atas angka RLS Provinsi Sumatera Utara. Sementara dua puluh satu kabupaten/kota lainnya berada di bawah angka Sumatera Utara dengan RLS terendah di Kabupaten Nias yang hanya sebesar 6,14 tahun.

c. Pengeluaran per Kapita

Dimensi terakhir yaitu standar hidup layak, yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Rata-rata pengeluaran per kapita (PPP) Kota Medan sebesar 15,674 ribu rupiah per tahun. Angka ini masih diatas rata-rata pengeluaran per kapita Sumatera Utara yang hanya sebesar 10,848 juta rupiah. PPP di Kota Medan berada di urutan pertama menurut kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 3.5 Pengeluaran per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2023 (ribu rupiah)



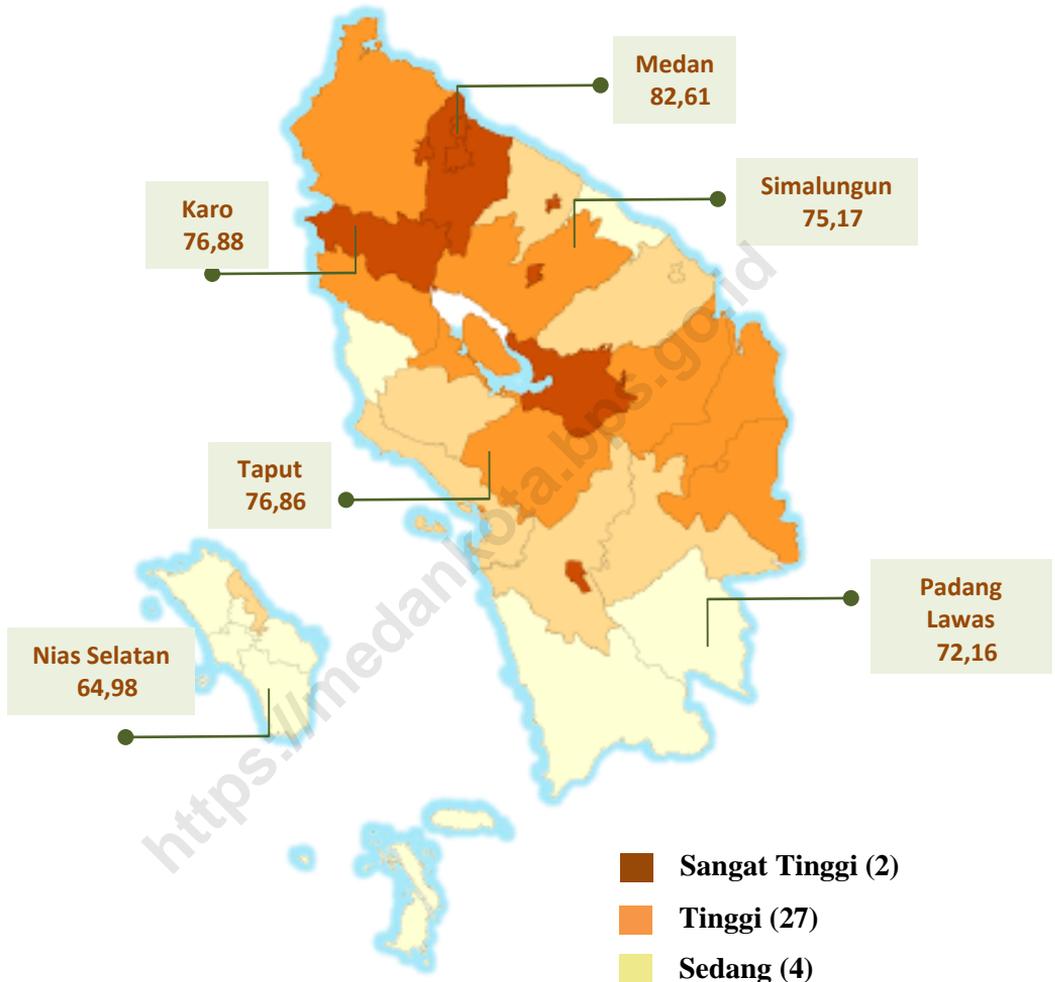
Dibandingkan PPP Sumatera Utara, Kota Medan bersama sebagian besar kabupaten/kota yang ada di provinsi ini memiliki pengeluaran per kapita diatas rata-rata yaitu sebanyak 18 kabupaten/kota. Hanya sebagian kecil yaitu sebanyak 14 kabupaten/kota yang pengeluaran perkapitanya dibawah rata-rata pengeluaran per kapita provinsi dengan pengeluaran perkapita terendah ada di Kabupaten Nias Barat yang hanya 6.382 ribu rupiah per kapita per tahun.

3.3 Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan pada tahun 2023 telah mencapai 82,61 dan tertinggi di Sumatera Utara. IPM terendah di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Nias Barat dengan IPM yang hanya sebesar 64,68. Selain Kota Gunungsitoli, empat kabupaten yang berada di kepulauan Nias berada pada urutan terakhir pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.

Status pembangunan manusia ibukota Provinsi Sumatera Utara tersebut telah masuk pada kategori “sangat tinggi”. Selain Kota Medan, masih ada 27 kabupaten/kota lain yang berada pada posisi “tinggi” antara lain Kota Gunungsitoli, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Kota Sibolga, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Toba Samosir, Kota Padangsidimpuan, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara juga telah masuk pada kategori “tinggi”.

Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2023

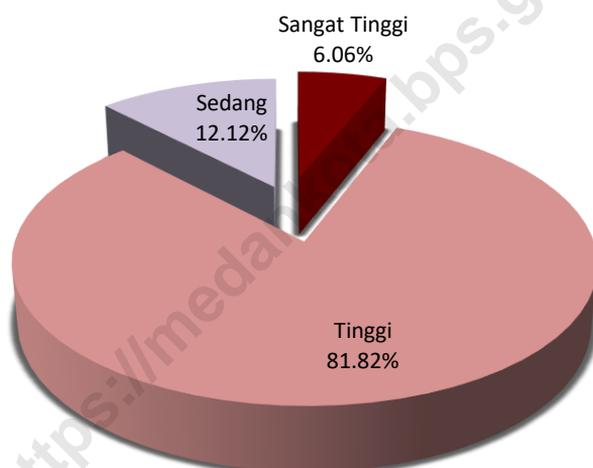


Pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang capaian pembangunannya berada pada posisi “rendah”. Sebagian besar kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara berada pada posisi “tinggi” dan sebagian kecil berada pada posisi “sedang”. Terdapat dua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang berada pada kategori pembangunan manusia “sangat tinggi”.

Status Pembangunan Manusia

Sebesar 12,12 persen status pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara masih berstatus “sedang”. Lebih dari setengah (81,82 persen) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi” dan hanya sebesar 6,06 persen status capaian pembangunan manusia berstatus “sangat tinggi.”

Gambar 3.7 Persentase Status Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2023



Dua Kota atau sekitar 6,06 persen telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “sangat tinggi”, 27 kabupaten/kota atau sekitar 81,82 persen dari total telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”, 27 pada Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Gunungsitoli, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Kota Sibolga, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Toba Samosir, Kota Padangsidimpuan,

Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi. Sementara itu, 4 kabupaten/ kota masuk pada kategori pembangunan manusia “sedang”. Kabupaten/kota yang berada pada kategori ini adalah Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Utara.

<https://medankota.bps.go.id>

BAB 4

PERKEMBANGAN IPM KOTA MEDAN

Umur harapan hidup mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar **0,59 persen** pada tahun **2023**.



Pencapaian IPM tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar **82,61 poin**, dan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar **0,53 persen** selama periode 2020-2023.



Rata-rata lama sekolah mengalami percepatan pertumbuhan sebesar **1,14 persen** pada tahun **2023**.

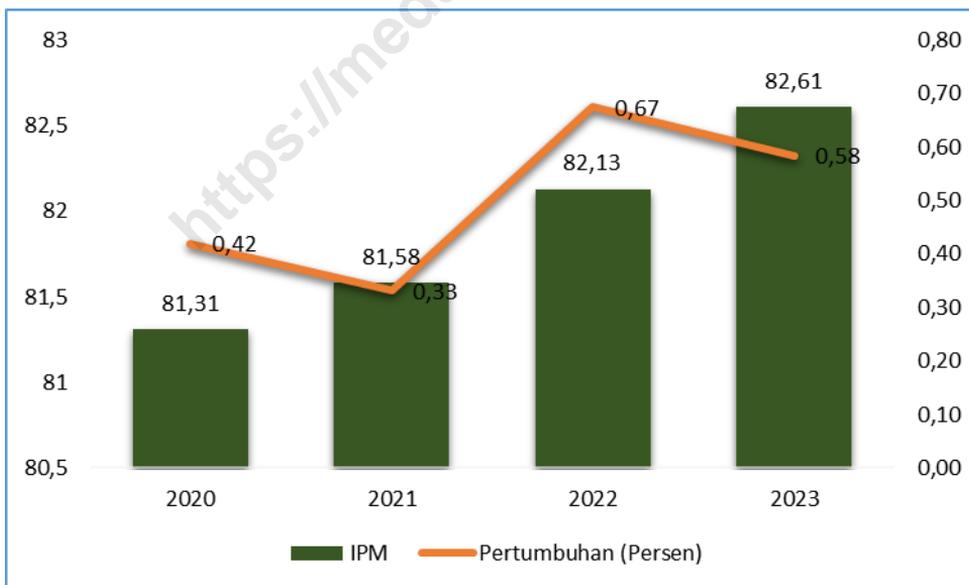
BAB 4

KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA

4.1 Tren Terbaru dalam Pembangunan Manusia: Melalui Lensa IPM

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Perkembangan pembangunan manusia secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. IPM Kota Medan tahun 2020 sebesar 81,31 terus meningkat menjadi 82,61 pada tahun 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Kota Medan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,50 persen per tahun.

Gambar 4.1 Perkembangan IPM Kota Medan, 2020-2023



Peningkatan pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun. Seluruh kabupaten/kota menunjukkan kenaikan IPM selama periode 2020 hingga 2023. Beberapa wilayah mencatat perkembangan yang signifikan. Setidaknya, empat kabupaten/kota mencatat perkembangan paling cepat selama pada periode 2022-2023.

Kabupaten/Kota dengan pembangunan manusia tercepat yaitu Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias, dan Batu Bara.

Tabel 4.1 Kabupaten/Kota dengan Perkembangan Tercepat dalam Pembangunan Manusia di Sumatera Utara, 2022-2023

Rank	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan
1	Batubara	1,13
2	Nias	1,32
3	Nias Utara	1,38
4	Nias Selatan	1,45

Apabila ditelusuri lebih jauh, wilayah yang mencatat perkembangan tercepat sebagian besar merupakan wilayah dengan capaian IPM tidak begitu tinggi. Bahkan, beberapa wilayah merupakan daerah dengan IPM terendah. Capaian IPM rendah bukan menjadi hambatan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat dibanding wilayah dengan capaian yang sudah tinggi.

4.2 Lompatan Status Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 telah mencapai 75,13 dengan status pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara tetap berstatus “tinggi”. Pada tingkat kabupaten/kota, capaian pembangunan manusianya cukup bervariasi. Dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, tidak ada lagi kabupaten/kota yang berkategori "Rendah". Terdapat 4 Kabupaten/kota yang berada pada kategori "Sedang", 27 Kabupaten/Kota yang telah mencapai kategori "Tinggi", dan dua kabupaten/kota yang mencapai kategori “sangat tinggi”.

Pada tahun 2023, perubahan status terjadi di satu kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pematang Siantar yang mengalami kenaikan status IPM. Tahun 2022 kabupaten tersebut masih dalam kategori “tinggi”, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan level menjadi kategori "Sangat Tinggi". Mayoritas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan status pembangunan tinggi. Hal ini menunjukkan peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara sudah semakin membaik.

Tabel 4.2 Perubahan Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2022-2023

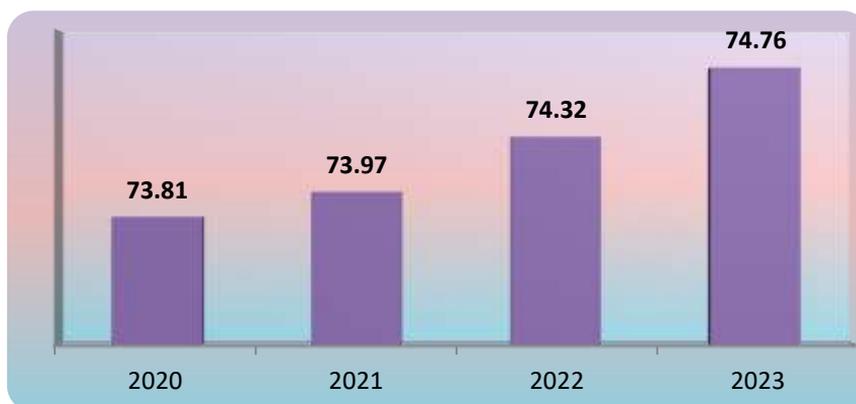
Kabupaten/Kota	Status IPM 2022	Status IPM 2023
Kota Pematang Siantar	Tinggi	Sangat Tinggi

4.3 Hidup Lebih Lama, Kesehatan yang Lebih Baik

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, salah satu faktornya diperlukan kesehatan yang lebih baik. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator angka harapan hidup saat lahir (e_0). Indikator UHH menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan di bidang kesehatan. Umur Harapan Hidup (UHH) dapat menunjukkan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya.

UHH dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, diharapkan kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Umur harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin rendah angka kematian bayi maka angka harapan hidup akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.

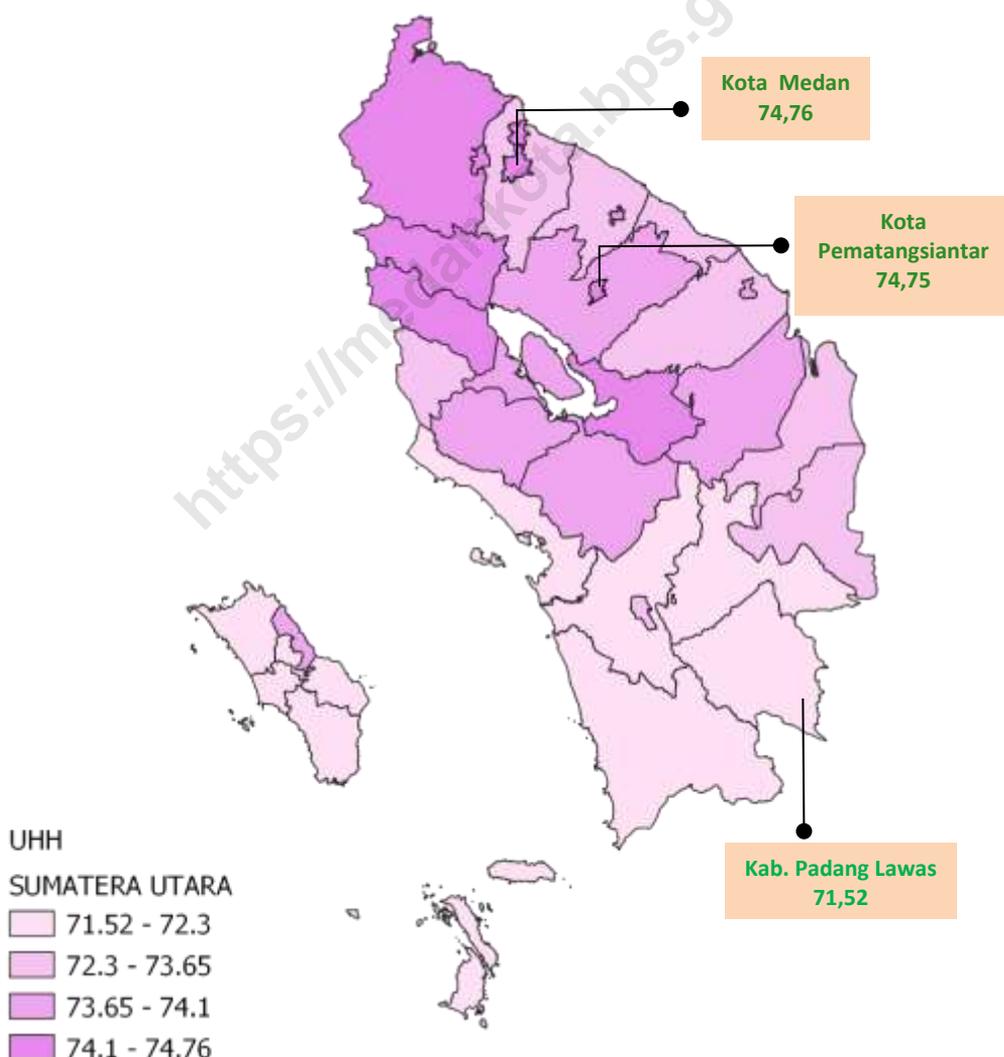
Gambar 4.2 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Medan, 2020-2023



Gambar 4.2 memperlihatkan perkembangan UHH Sumatera Utara selama kurun waktu enam tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat bahwa UHH Kota Medan

selama periode 2020-2023 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. UHH Kota Medan pada tahun 2023 mencapai 74,76 tahun. Berarti setiap bayi di Kota Medan yang dilahirkan pada tahun 2023, dapat berharap untuk hidup sampai usia 74,76 tahun. Selama tahun 2020-2023, umur harapan hidup saat lahir di Kota Medan tumbuh rata-rata 0,43 persen per tahun.

Gambar 4.3 Umur Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2023



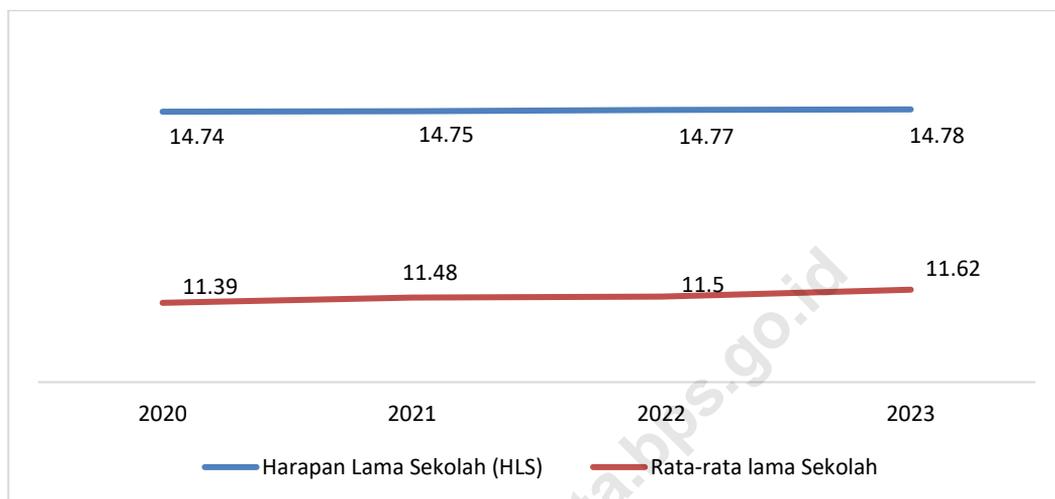
Variasi umur harapan hidup berkisar dari 71,52 tahun hingga 74,76 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Medan. Sementara angka harapan hidup terendah berada di Kabupaten Padang Lawas. Terdapat kecenderungan bahwa relatif lebih mudah meningkatkan capaian pada daerah yang masih rendah melalui beberapa program pembangunan, dibandingkan daerah dengan capaian yang sudah tinggi.

4.4 Pendidikan Memperluas Peluang

Pendidikan memperluas peluang seseorang, juga meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain. Manusia yang berpendidikan kecenderungan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan secara umum juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Pendidikan juga mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik muda maupun tua di setiap jenjang pendidikan utamanya hingga SLTA, serta untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha. Peningkatan partisipasi masyarakat ini, bisa dilihat dari peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk, yang keberhasilannya memerlukan dukungan keluarga, masyarakat luas dan pemerintah.

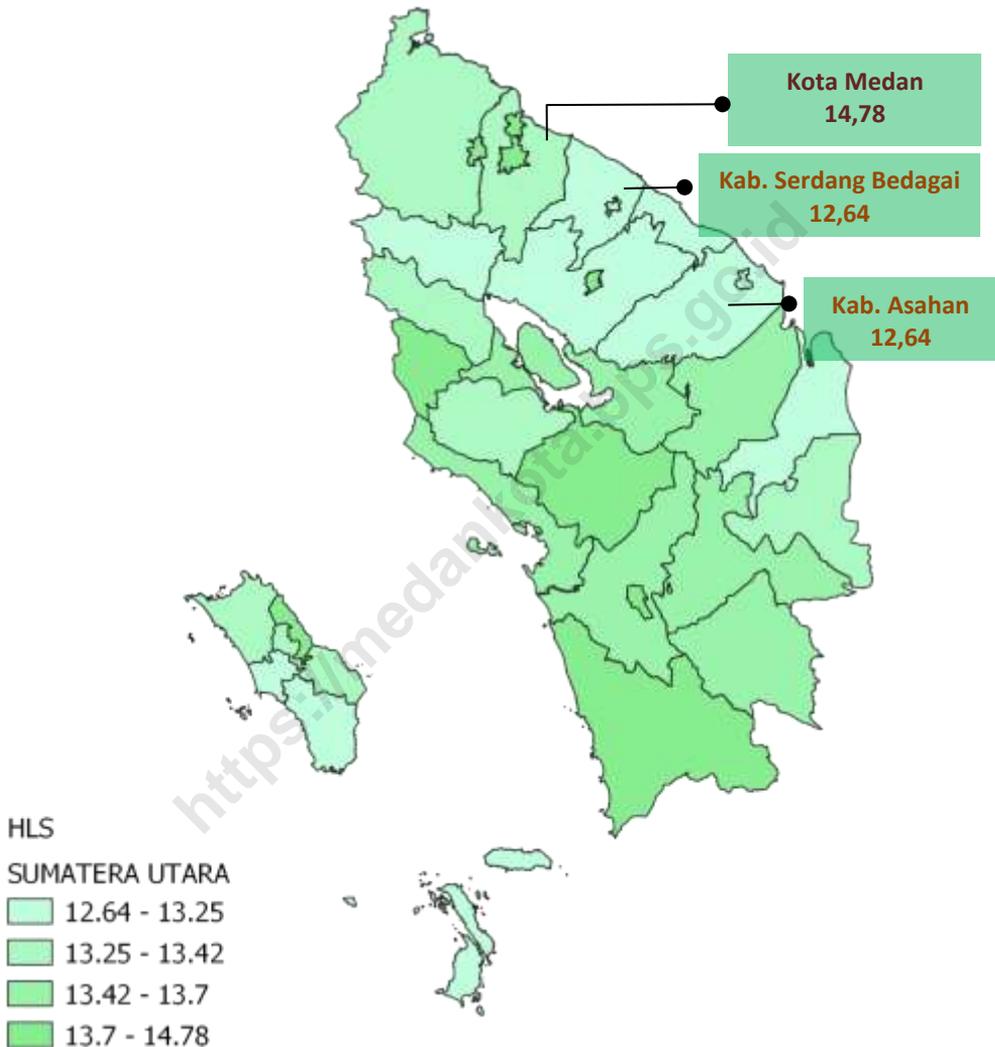
Gambar 4.4 Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Medan Tahun 2020-2023



Sampai dengan tahun 2023, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Medan telah mencapai 11,62 tahun. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 14,78 tahun. Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kota Medan selama empat tahun terakhir secara umum meningkat.

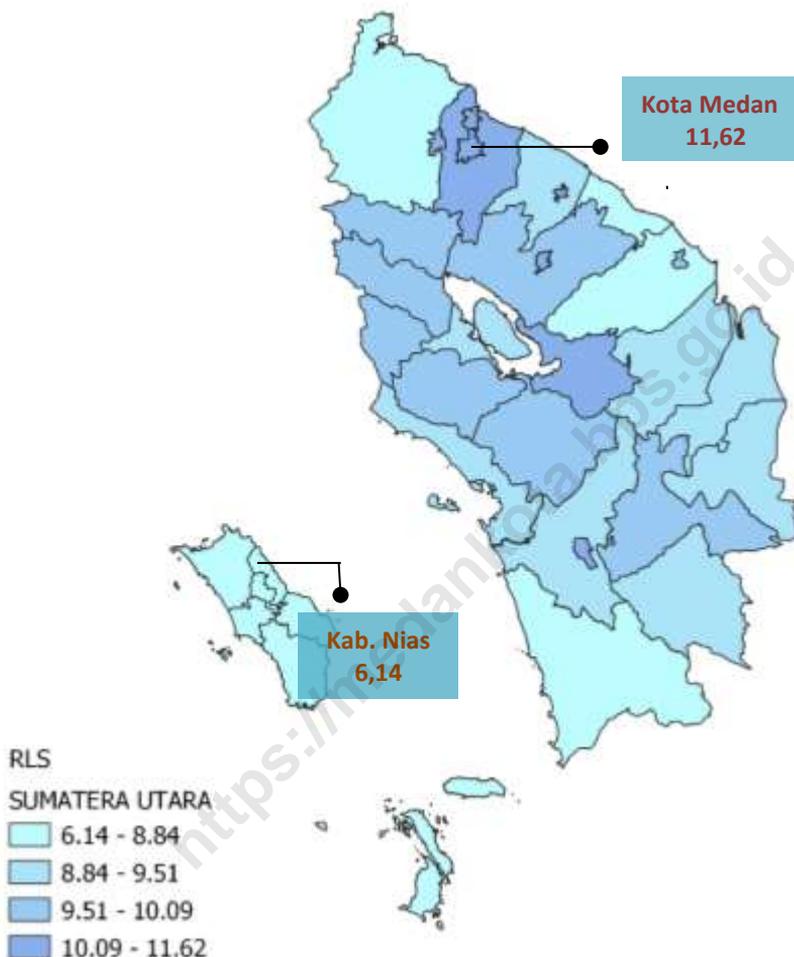
Pada tahun 2020, harapan lama sekolah di Kota Medan sebesar 14,74 tahun secara konsisten terus meningkat menjadi 14,78 tahun pada tahun 2023. Demikian juga untuk rata-rata lama sekolah, pada tahun 2020 sebesar 11,39 tahun meningkat hingga 11,62 tahun pada tahun 2023. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator output pendidikan. Kota Medan merupakan pusat pemerintahan, sentra perekonomian, dan pusat kegiatan lainnya di Sumatera Utara sehingga menjadi kantong penduduk dengan pendidikan tinggi.

Gambar 4.5 Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2023



Pada tahun 2023, harapan lama sekolah di Sumatera Utara berkisar antara 12,64 tahun hingga 14,78 tahun. Harapan lama sekolah tertinggi berada di Kota Medan yaitu selama 14,78 tahun. Sementara harapan lama sekolah terendah di Kabupaten Asahan dan Serdang Bedagai yaitu hanya selama 12,64 tahun. Jika dilihat dari perkembangannya, selama kurun waktu 2022-2023 harapan lama sekolah tumbuh paling cepat di Kabupaten Batubara sebesar 5,81 persen.

Gambar 4.6 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2023



Rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara tahun 2023 berkisar antara 6,14 tahun hingga 11,62 tahun. Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Medan yaitu 11,62 tahun. Sementara terendah di Kabupaten Nias yaitu penduduk umur 25 tahun keatas dengan rata-rata lama sekolah hanya selama 6,14 tahun. Jika dilihat dari perkembangannya, selama kurun waktu 2022-2023 rata-rata lama sekolah tumbuh paling cepat di Kabupaten Nias sebesar 4,42 persen.

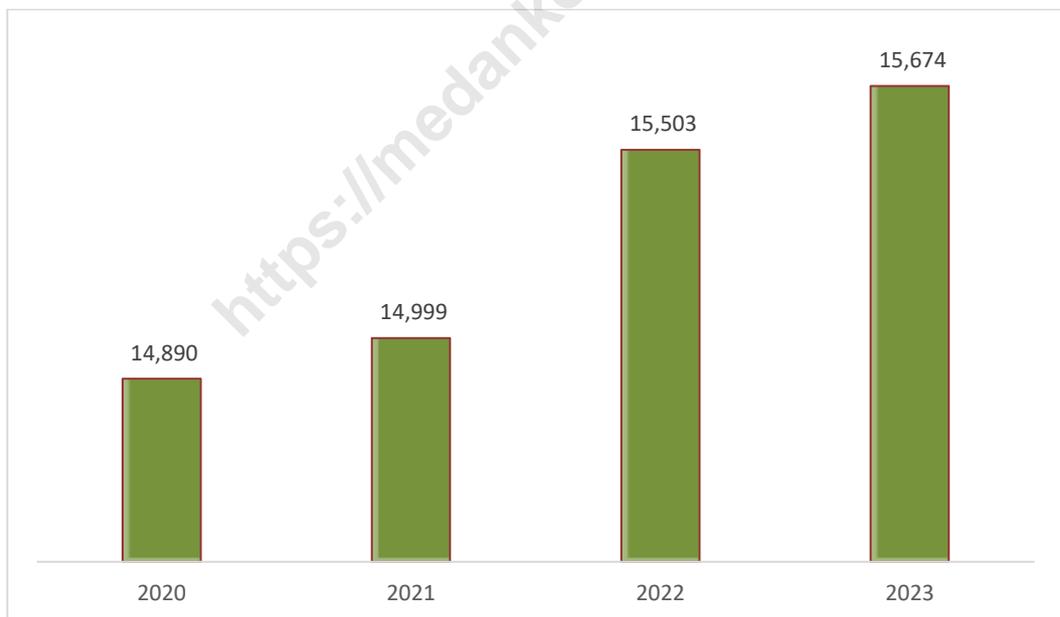
4.5 Kenaikan Standar Hidup

Pengeluaran atau pendapatan telah memberikan sedikit gambaran mengenai ukuran pembangunan, seperti yang telah terjadi pada era tahun 70-an. Akan tetapi uang

memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, perkembangan tingkat pengeluaran menjadi hal menarik untuk diteliti.

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Gambar 4.7 Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun Kota Medan, 2020-2023 (juta rupiah)



Tahun 2023, pengeluaran per kapita penduduk Kota Medan telah mencapai 15,67 juta per tahun. Pada Tahun 2020 tingkat daya beli masyarakat Kota Medan sebesar 14,89 juta rupiah per kapita per tahun, meningkat menjadi 15,67 juta rupiah per kapita per tahun pada tahun 2023. Kemampuan daya beli masyarakat Kota Medan selama periode 2020-2023 terus meningkat.

Gambar 4.8 Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2023 (juta rupiah)



Di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara, pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2023 berkisar antara 6,38 juta rupiah hingga 15,67 juta rupiah. Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Kota Medan, sementara pengeluaran per kapita terendah berada di Kabupaten Nias Barat. Dalam kurun waktu 2022-2023, pengeluaran per kapita di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan. Kabupaten Nias Barat merupakan kabupaten/kota dengan pertumbuhan pengeluaran per kapita di Sumatera Utara paling tinggi sebesar 3,74 persen. Sementara Kabupaten Gunungsitoli merupakan kabupaten/kota dengan pertumbuhan pengeluaran per kapita paling kecil di Sumatera Utara sebesar -0,82 persen.



BAB 5

DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA SUMATERA UTARA 2023



IPM Kota Medan tertinggi di Sumatera Utara sebesar 82,61

IPM Kota Pematang siantar tertinggi kedua di Sumatera Utara sebesar 80,46

IPM Kabupaten Nias dan Kepulauan berstatus kategori sedang (<70 poin), kecuali Kota Gunungsitoli.



IPM

-  Sedang
-  Tinggi
-  Sangat Tinggi



Tahun 2023, terdapat 2 kota yang memiliki status pembangunan manusia berkategori "Sangat Tinggi" yaitu Kota Medan dan Kota Pematangsiantar.

BAB 5

DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA UTARA

5.1 Gambaran Umum Wilayah Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1⁰-4⁰ Lintang Utara dan 98⁰ - 100⁰ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 memiliki 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 4 (empat) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur, dan Wilayah Kepulauan.

Tabel 5.1 Penggolongan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menurut Wilayah

Pantai Timur	Dataran Tinggi	Pantai Barat	Kepulauan Nias
Kab. Labuhan Batu	Kab. Tapanuli Utara	Kab. Mandailing Natal	Kab. Nias
Kab. Asahan	Kab. Toba Samosir	Kab. Tapanuli Selatan	Kab. Nias Utara
Kab. Deli Serdang	Kab. Simalungun	Kab. Tapanuli Tengah	Kab. Nias Barat
Kab. Langkat	Kab. Dairi	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Nias Selatan
Kab. Serdang Bedagai	Kab. Karo	Kab. Padang Lawas	Kota Gunung Sitoli
Kab. Batu Bara	Kab. Humbang Hasundutan	Kota Sibolga	
Kab. Labuhan Batu Selatan	Kab. Pakpak Bharat	Kota Padangsidimpuan	
Kab. Labuhan Batu Utara	Kab. Samosir		
Kota Tanjungbalai	Kota Pematangsiantar		
Kota Tebing Tinggi			
Kota Medan			
Kota Binjai			

Sumber: Bappeda Sumatera Utara

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km² atau 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.

5.2 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kawasan Pantai Barat, Dataran Tinggi, Pantai Timur, dan Wilayah Kepulauan

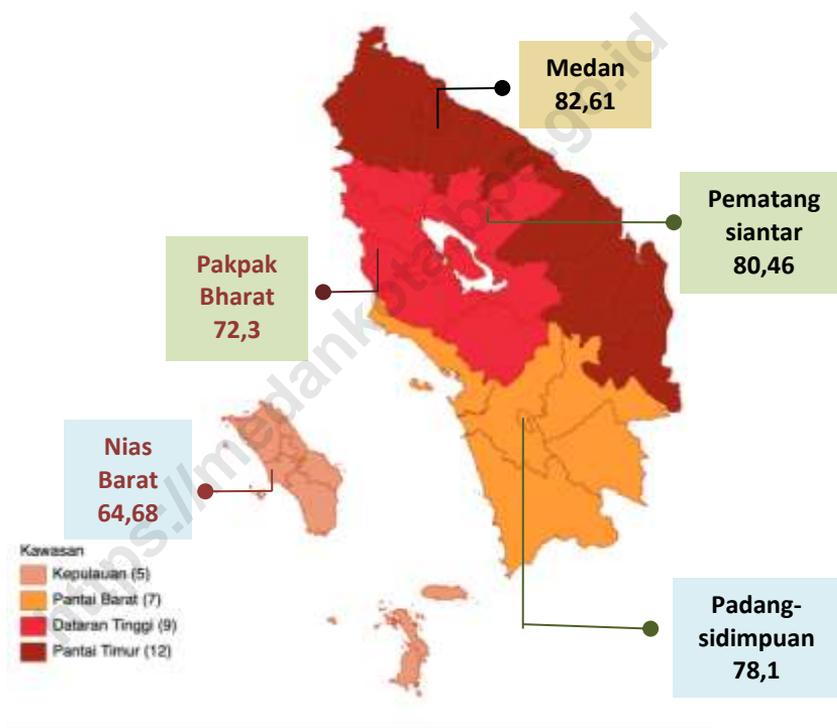
Kesenjangan pencapaian pembangunan antar daerah bukan merupakan masalah baru bagi Indonesia khususnya Sumatera Utara. Kompleksitas berbagai faktor seperti sumber daya manusia, letak geografis, sejarah, dan ketidakmerataan sumber daya alam merupakan hal yang masih menjadi kendala dalam menuju konvergensi pembangunan. Oleh sebab itu, pemerataan pembangunan masih menjadi agenda pokok pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2020-2023.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat yang secara langsung juga mempengaruhi kualitas manusianya. Oleh sebab itu, perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah menjadi sangat penting sebagai dasar evaluasi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang selanjutnya digunakan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Perbandingan pencapaian pembangunan manusia antara Kawasan Pantai Barat (KPB), Kawasan Dataran Tinggi (KDT), Kawasan Pantai Timur (KPT), dan Kawasan Kepulauan sangat menarik untuk dibahas, mengingat kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kawasan Pantai Timur mencapai 74,61 persen dari keseluruhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara tahun 2021. Ketimpangan tersebut tidak terlepas dari faktor kualitas sumber daya manusianya.

Berkaitan dengan pembangunan manusia, kesenjangan pembangunan manusia juga terjadi antara kawasan pantai timur, dataran tinggi dan pantai barat. Secara umum pembangunan manusia di kawasan pantai barat lebih tertinggal dibandingkan kawasan dataran tinggi dan pantai timur.

Gambar 5.1 IPM Tertinggi dan Terendah menurut Kawasan di Sumatera Utara, 2023



Tahun 2023, IPM kabupaten/kota tertinggi di kawasan Pantai Timur telah mencapai 82,61 (Medan) dan IPM terendah 72,56 (Batubara), sedikit berbeda dengan kawasan Dataran Tinggi IPM tertinggi mencapai 80,46 (Pematangsiantar) dan IPM terendah 72,3(Pakpak Barat). Sementara di kawasan Pantai Barat, IPM kabupaten/kota tertinggi sebesar 78,1 (Padangsidimpuan) dan IPM terendah sebesar 72,16 (Padang Lawas). Di kawasan Kepulauan, IPM tertinggi berada di Kota Gunung Sitoli (71,55) dan IPM terendah berada di Kabupaten Nias Barat (64,98). Perbedaan yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antar kawasan di Sumatera Utara masih dirasakan secara nyata.

Capaian pembangunan manusia di kawasan Dataran Tinggi, Pantai Timur, dan Pantai Barat lebih maju dibandingkan dengan capaian di kawasan Kepulauan. Tahun 2023, sebanyak 88,89 persen kabupaten/kota di kawasan Dataran Tinggi, 91,67 persen kabupaten/kota di kawasan pantai Timur, dan 100 persen kabupaten/kota di kawasan Pantai Barat telah berada pada status pembangunan manusia “tinggi”. Sementara di kawasan Kepulauan hanya 20 persen kabupaten/kota (Kota Gunung Sitoli) yang telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”.

Tabel 5.2 Persentase Status IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menurut Kawasan, 2023

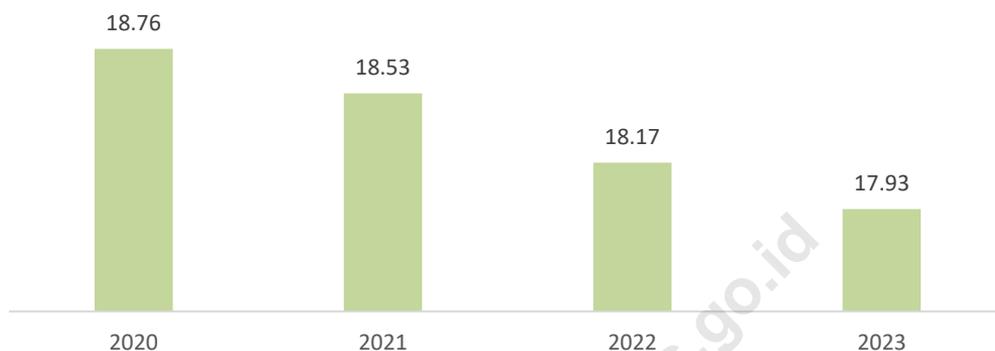
Kawasan	Status Pembangunan Manusia			
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
Pantai Timur	8,33	91,67	-	-
Dataran Tinggi	11,11	88,89	-	-
Pantai Barat	-	100	-	-
Wilayah Kepulauan	-	20	80	-

Disparitas yang cukup tinggi tidak bisa dibiarkan berlanjut ke generasi yang akan datang. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Sumatera Utara adalah hal yang perlu dilakukan sebagai titik awal menuju Sumatera Utara yang lebih merata karena upaya pemerataan pembangunan tidak akan terwujud dalam jangka waktu singkat.

5.3 Kesenjangan Pembangunan Manusia di Sumatera Utara

Selama kurun waktu empat tahun, kesenjangan pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara secara umum mengalami penurunan. Selama tahun 2020-2023, terjadi penurunan kesenjangan antara angka IPM tertinggi dan terendah. Tahun 2020 selisih IPM kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 18,76 turun menjadi 17,93 pada tahun 2023. Rentang IPM cenderung menyempit.

Gambar 5.2 Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2020-2023

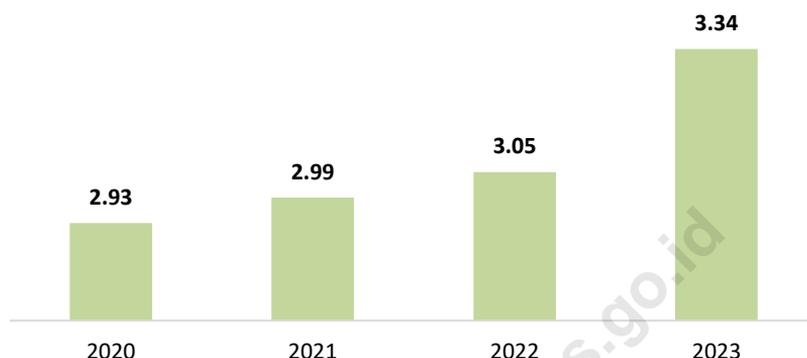


Penurunan kesenjangan IPM cukup menggembirakan, namun upaya pemerataan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Kesenjangan pembangunan manusia di Sumatera Utara terjadi akibat perbedaan signifikan antara Kota Medan dengan Kabupaten Nias Barat. Pemerintah tentunya harus mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas agar kesenjangan juga semakin mengecil. Bagi sebuah paradoks, peningkatan yang signifikan di suatu wilayah, akan memperbesar jurang perbedaan jika tidak diimbangi oleh pembangunan wilayah lainnya.

a. Kesenjangan Kesehatan

Seiring dengan kesehatan masyarakat Sumatera Utara yang semakin membaik, kesenjangan kesehatan antar kabupaten/kota pun semakin mengecil. Hal ini dapat dilihat dari jarak antara UHH tertinggi dengan UHH terendah. Tahun 2020 selisih UHH kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 2,93 naik menjadi 3,24 pada tahun 2020 hingga 2023 rentang kesenjangan UHH cenderung meluas.

Gambar 5.3 Perkembangan Selisih UHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2020-2023



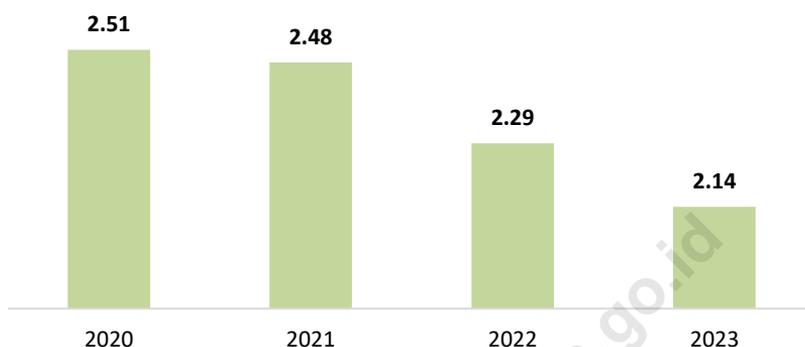
Kabupaten/kota dengan UHH terendah yaitu Kabupaten Padang Lawas, sedangkan UHH tertinggi dicapai Kota Medan. Kesenjangan sebesar 3,34 pada tahun 2023 tergolong masih tinggi. Dalam hal ini, upaya-upaya untuk pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat harus terus digalakkan agar kesenjangan kesehatan semakin kecil.

b. Kesenjangan Pendidikan

Disparitas pembangunan manusia di bidang pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan.

Disparitas pendidikan yang ditunjukkan dengan rentang angka harapan lama sekolah tertinggi dan terendah kabupaten/kota di Sumatera Utara cenderung meningkat. Tahun 2020 selisih HLS kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 2,51 turun menjadi 2,14 pada tahun 2023. Hal ini cukup baik, karena selisih yang semakin menurun sejak 2020 hingga 2023.

Gambar 5.4 Perkembangan Selisih HLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2020-2023



Disparitas angka harapan lama sekolah di Sumatera Utara dilihat dari perbedaan capaian antara Kota Medan dengan Kabupaten Asahan dan Serdang Bedagai. Pada tahun 2023, rata-rata penduduk usia 7 di Kota Medan berpotensi menempuh pendidikan selama 14,78 tahun atau menyelesaikan D2/D3. Di tahun yang sama, penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Asahan dan Serdang Bedagai hanya berpotensi menempuh pendidikan selama 12,64 tahun yaitu sekitar tamat SLTA sederajat. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sekolah di Sumatera Utara tetap perlu ditingkatkan.

Selama enam tahun terakhir, disparitas rata-rata lama sekolah (RLS) tertinggi dengan terendah yang terjadi di Sumatera Utara cenderung berfluktuatif. Tahun 2020 selisih RLS kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 6,03 tahun turun menjadi 5,48 tahun pada tahun 2023. Hal ini tentu saja masih menjadi perhatian untuk memperkecil disparitas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 5.5 Perkembangan Selisih RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2020-2023

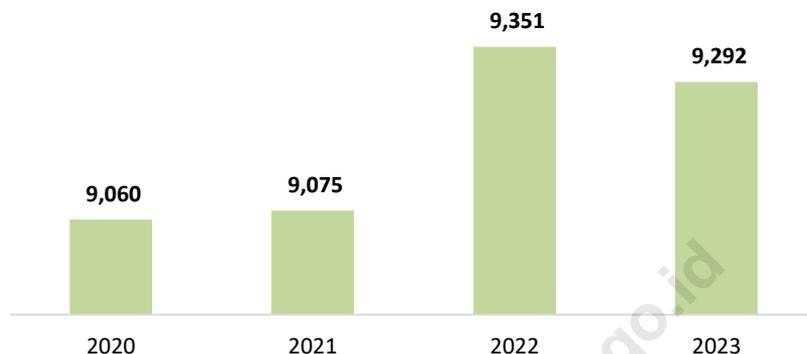


Kesenjangan rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara terjadi akibat perbedaan capaian antara Kota Medan dengan Kabupaten Nias. Tahun 2023 rata-rata penduduk Kota Medan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,62 tahun atau kelas dua SLTA. Sementara penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Nias, rata-rata hanya menempuh pendidikan selama 6,14 tahun atau kelas enam Sekolah Dasar. Pemerataan sarana dan akses pendidikan harus diperhatikan agar kesenjangan semakin kecil.

c. Kesenjangan Pengeluaran per Kapita

Dimensi standar hidup yang layak menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita. Selama kurun waktu 2020 hingga 202, angka pengeluaran per kapita Sumatera Utara terus meningkat. Namun, hal itu masih menyisakan persoalan kesenjangan antar wilayah atau disparitas.

Gambar 5.6 Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2020-2023



Berbeda dengan dimensi pendidikan dan kesehatan yang kesenjangan cenderung menurun, untuk pengeluaran per kapita kesenjangan cenderung meningkat. Tahun 2020 selisih pengeluaran per kapita kabupaten/kota tertinggi yaitu Kota Medan dengan terendah yaitu Kab. Nias Barat sebesar 9,060 juta. Namun pada tahun 2023 selisih pengeluaran per kapita naik menjadi 9,292 juta. Artinya, kesenjangan pengeluaran per kapita di Kota Medan dengan Kabupaten Nias Barat mencapai 9,292 juta rupiah. Rentang pengeluaran per kapita di Sumatera Utara cenderung melebar.

5.4 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kabupaten dan Kota

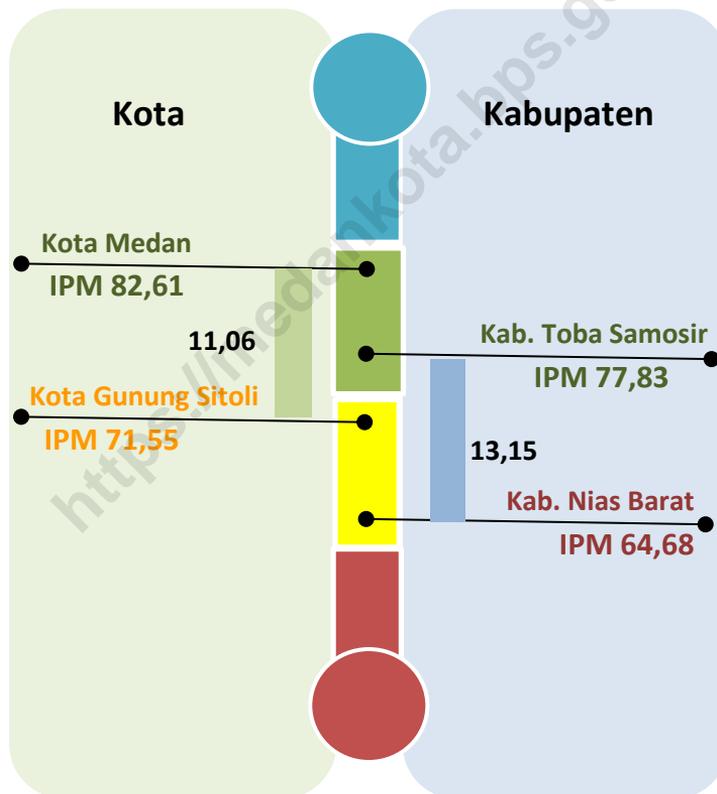
Hal yang lebih menarik jika membandingkan pencapaian pembangunan manusia antar kabupaten dan kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa kota memiliki daya tarik tersendiri dibanding kabupaten. Kota menyediakan berbagai macam fasilitas yang memadai sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan mudah. Kemudahan akses yang tersedia di kota cukup banyak, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, secara fisik umumnya kota jauh lebih maju dibanding kabupaten.

Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota yaitu 8 wilayah kota dan 25 wilayah kabupaten pada tahun 2023. Capaian pembangunan manusia di kota memang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten. Tahun 2023, capaian pembangunan manusia paling tinggi untuk wilayah kota adalah Kota Medan dengan capaian sebesar

82,61. Sementara itu, capaian pembangunan manusia paling tinggi untuk wilayah kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir sebesar 77,83.

Pada tahun yang sama, capaian pembangunan manusia untuk wilayah kota yang paling rendah yaitu Kota Gunungsitoli dengan IPM sebesar 71,55. Sementara itu untuk wilayah kabupaten, capaian IPM terendah yaitu Kabupaten Nias Barat dengan IPM sebesar 64,68.

Gambar 5.7 IPM Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2023

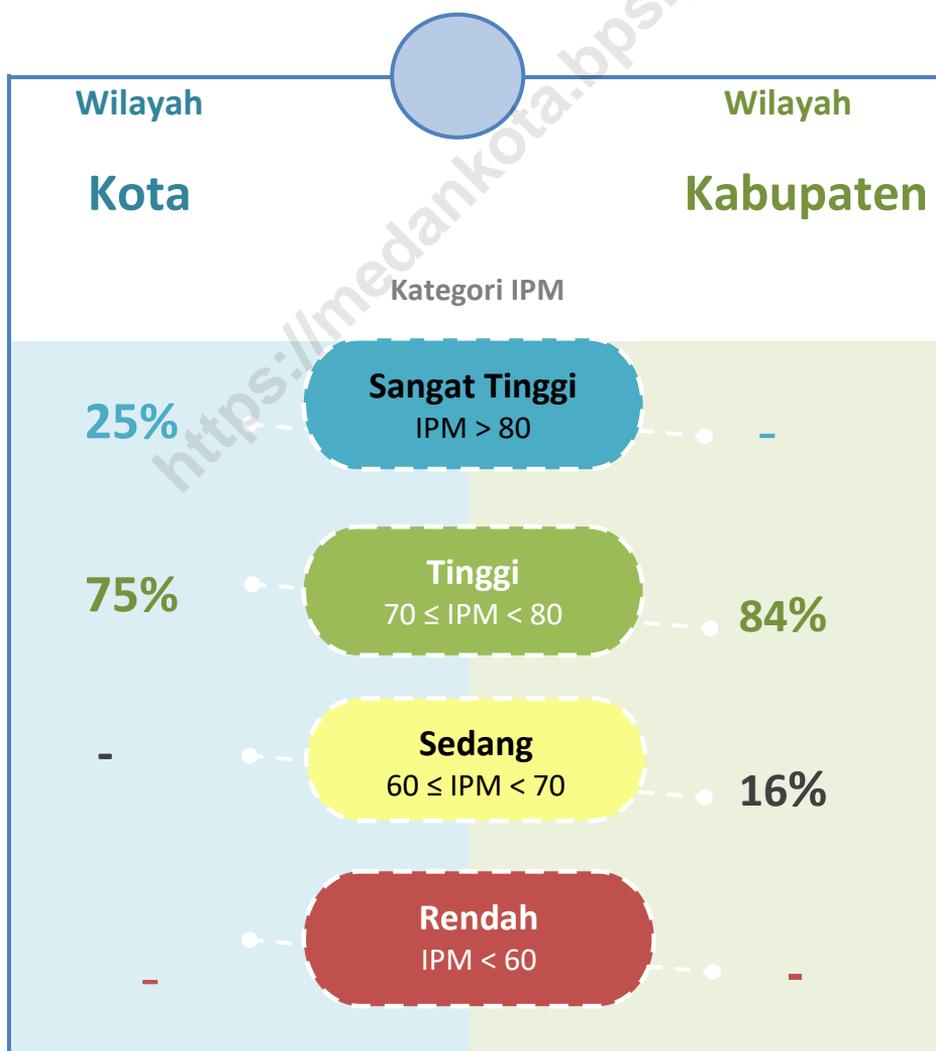


Kesenjangan pembangunan manusia antara kota dengan kabupaten tidak terlalu signifikan dalam pembangunan manusia di Sumatera Utara. Tahun 2023, IPM Kota Medan dengan Kota Gunungsitoli berjarak 11,06. Jika dibandingkan dengan kondisi di wilayah kabupaten, jarak IPM antara Kabupaten Toba Samosir dengan Kabupaten Nias Barat mencapai 13,15. Artinya disparitas pembangunan manusia yang terjadi di kota

hanya sedikit lebih baik dibanding apa yang terjadi di wilayah kabupaten. Hal ini diduga karena di Sumatera Utara terdapat Kota yang jaraknya cukup jauh dari ibukota provinsi.

Jika dilihat dari status pembangunan manusia, menunjukkan ada sedikit perbedaan kemajuan antara kota dengan kabupaten di Sumatera Utara. Tahun 2023, sudah ada wilayah kota dengan status pembangunan manusia “sangat tinggi”. Sementara di wilayah kabupaten belum ada wilayah dengan status pembangunan manusia "sangat tinggi".

Gambar 5.8 Perbandingan IPM kabupaten/Kota di Sumatera Utara menurut Status IPM, 2023



Baik di wilayah kabupaten maupun kota, mayoritas status pembangunan manusia sudah berkategori “Tinggi”, yaitu sebanyak 84 persen dan 75 persen dari total kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Sementara di wilayah Kota, hanya 25 persen kota yang memiliki status pembangunan manusia berkategori “sangat tinggi”, sedangkan 16 persen dari wilayah kabupaten masih memiliki status pembangunan manusia “sedang”. Perbedaan kemajuan pembangunan antara kota dan kabupaten semakin terlihat, meski tidak ada lagi kabupaten yang berstatus pembangunan manusia “rendah”.

Selama kurun waktu 2020-2023, perkembangan tingkat kesenjangan yang terjadi di kota dan kabupaten mengalami dinamika. Kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi di kota selama 2020 hingga 2023 cenderung turun. Jarak antara IPM tertinggi dan terendah di kota turun dari 11,09 pada tahun 2020 menjadi 11,06 pada tahun 2023. Hal yang sama terjadi di kabupaten dengan kesenjangan pembangunan manusia yang juga cenderung turun. Tahun 2020, kesenjangan antara IPM tertinggi dan terendah di kabupaten berjarak 14,23, pada tahun 2023 jaraknya telah mengecil menjadi sebesar 13,15.

Fenomena kesenjangan di kota dan kabupaten juga terjadi pada semua dimensi pembangunan manusia, baik kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup yang layak. Fenomena yang cukup menarik ternyata kesenjangan yang terjadi di kota lebih besar jika dibandingkan dengan kesenjangan yang terjadi di kabupaten. Hal ini terjadi pada semua dimensi, kecuali dimensi pendidikan.

Kesenjangan UHH yang terjadi di kota hampir sama dibandingkan kesenjangan UHH di kabupaten. Tahun 2023, jarak antara angka harapan hidup tertinggi dan terendah di kota sebesar 1,22 tahun. Sementara itu, perbedaan capaian angka harapan hidup tertinggi dan terendah di kabupaten 2,7 tahun. Perbaikan kesenjangan UHH di kota cenderung lebih cepat dibanding dengan kabupaten.

Dimensi berikutnya yang cukup penting adalah dimensi pendidikan yang terdiri dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kesenjangan harapan lama sekolah yang terjadi di kota hampir sama dibandingkan kesenjangan HLS di kota. Tahun 2023, jarak antara harapan lama sekolah tertinggi dan terendah di kota

1,66 tahun. Hanya sedikit berbeda, jarak antara harapan lama sekolah tertinggi dan terendah di kabupaten 1,26 tahun.

Kesenjangan rata-rata lama sekolah yang terjadi di kabupaten hampir dua kali lebih parah dibandingkan kesenjangan di kota. Tahun 2023 misalnya, perbedaan antara rata-rata lama sekolah tertinggi dan terendah di kota hanya 2,97 tahun. Sementara perbedaan di kabupaten mencapai 4,45 tahun. Tercatat bahwa selama tahun 2020 hingga 2023, kesenjangan rata-rata lama sekolah di kabupaten dan kota sama-sama berfluktuasi.

Kesenjangan pengeluaran per kapita yang terjadi di kota lebih tinggi dibandingkan dengan kesenjangan yang terjadi di kabupaten dengan angka yang hampir mendekati. Namun perkembangan kesenjangan keduanya selama empat tahun justru cenderung semakin memburuk. Dengan demikian, dimensi ini juga perlu mendapat perhatian khusus agar kesenjangan pembangunan manusianya tidak semakin melebar.



LAMPIRAN

<https://medankota.bps.go.id>

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2020-2023

PROVINSI	IPM			
	2020	2021	2022	2023
ACEH	73.29	73.48	74.11	74.7
SUMATERA UTARA	73.62	73.84	74.51	75.13
SUMATERA BARAT	74.29	74.56	75.16	75.64
RIAU	73.67	73.89	74.45	74.95
JAMBI	72.29	72.62	73.11	73.73
SUMATERA SELATAN	71.62	71.83	72.48	73.18
BENGKULU	72.93	73.16	73.68	74.3
LAMPUNG	71.04	71.25	71.79	72.48
KEP. BANGKA BELITUNG	72.74	72.96	73.5	74.09
KEPULAUAN RIAU	77.69	77.87	78.48	79.08
DKI JAKARTA	81.92	82.25	82.77	83.55
JAWA BARAT	72.61	72.96	73.63	74.24
JAWA TENGAH	71.88	72.17	72.8	73.39
D I YOGYAKARTA	79.95	80.22	80.65	81.09
JAWA TIMUR	73.04	73.48	74.05	74.65
BANTEN	74.41	74.68	75.25	75.77
BALI	76.52	76.69	77.4	78.01
NUSA TENGGARA BARAT	70.46	70.86	71.65	72.37
NUSA TENGGARA TIMUR	66.93	67.02	67.63	68.4
KALIMANTAN BARAT	68.76	68.99	69.71	70.47
KALIMANTAN TENGAH	72.62	72.81	73.17	73.73
KALIMANTAN SELATAN	73.09	73.45	74	74.66
KALIMANTAN TIMUR	75.94	76.6	77.36	78.2
KALIMANTAN UTARA	71	71.57	72.21	72.88
SULAWESI UTARA	73.67	74.03	74.52	75.04
SULAWESI TENGAH	70.31	70.54	71.01	71.66
SULAWESI SELATAN	73.08	73.38	73.96	74.6
SULAWESI TENGGARA	71.61	71.82	72.38	72.94
GORONTALO	69.51	69.82	70.62	71.25
SULAWESI BARAT	68.4	68.64	69.19	69.8
MALUKU	71.34	71.55	72.04	72.75
MALUKU UTARA	69.3	69.56	70.26	70.98
PAPUA BARAT	65.94	66.11	66.72	67.47
PAPUA	61.22	61.4	62.16	63.01

Lampiran 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020-2023

KABUPATEN/KOTA	IPM (UHH SP2010)				IPM (UHH LF SP2020)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
NIAS	61.93	62.74	63.69	64.56	62.55	63.37	64.30	65.15
MANDAILING NATAL	66.79	67.19	68.05	68.56	70.89	71.31	72.17	72.65
TAPANULI SELATAN	70.12	70.33	70.92	71.55	73.16	73.37	73.96	74.58
TAPANULI TENGAH	69.23	69.61	70.31	70.91	71.10	71.48	72.18	72.77
TAPANULI UTARA	73.47	73.76	74.14	74.65	75.77	76.06	76.43	76.86
TOBA SAMOSIR	75.16	75.39	75.96	76.38	76.81	77.03	77.58	77.83
LABUHAN BATU	72.01	72.09	72.92	73.69	73.08	73.16	73.96	74.70
ASAHAN	70.29	70.49	71.13	71.56	72.35	72.55	73.18	73.59
SIMALUNGUN	73.25	73.40	73.77	74.29	74.19	74.33	74.68	75.17
DAIRI	71.57	71.84	72.56	73.27	73.63	73.89	74.60	75.18
KARO	74.43	74.83	75.36	75.98	75.40	75.81	76.37	76.88
DELI SERDANG	75.44	75.53	76.19	76.52	76.11	76.21	76.86	77.16
LANGKAT	71.00	71.35	71.86	72.21	73.14	73.50	74.03	74.33
NIAS SELATAN	61.89	62.35	63.17	64.12	62.78	63.24	64.05	64.98
HUMBANG								
HASUNDUTAN	68.87	69.41	70.32	70.75	70.70	71.28	72.05	72.49
PAKPAK BARAT	67.59	67.94	68.85	69.58	70.30	70.65	71.57	72.30
SAMOSIR	70.63	70.83	71.67	72.08	71.56	71.75	72.57	72.93
SERDANG BEDEGAI	70.24	70.56	71.21	71.75	71.93	72.25	72.89	73.40
BATU BARA	68.36	68.58	69.51	70.31	70.57	70.80	71.75	72.56
PADANG LAWAS UTARA	69.85	70.11	70.93	71.63	71.69	71.96	72.77	73.45
PADANG LAWAS	68.25	68.64	69.58	70.34	70.08	70.48	71.41	72.16
LABUHAN BATUSELATAN	71.40	71.69	72.16	72.82	72.86	73.15	73.59	74.23
LABUHAN BATU UTARA	71.61	71.87	72.77	73.63	73.47	73.73	74.61	75.45
NIAS UTARA	62.36	62.82	63.75	64.64	63.17	63.63	64.55	65.44
NIAS BARAT	61.51	61.99	62.93	63.70	62.58	63.05	63.96	64.68
KOTA SIBOLGA	73.63	73.94	74.74	75.20	75.56	75.87	76.69	77.07
KOTA TANJUNG BALAI	68.65	68.94	69.86	70.59	73.48	73.78	74.73	75.42
KOTA PEMATANGSIANTAR	78.75	79.17	79.70	80.46	78.75	79.17	79.71	80.46
KOTA TEBING TINGGI	75.17	75.42	76.17	76.98	76.40	76.65	77.39	78.17
KOTA MEDAN	80.98	81.21	81.76	82.19	81.31	81.58	82.13	82.61
KOTA BINJAI	75.89	76.01	76.95	77.60	76.45	76.57	77.50	78.11
KOTA PADANG SIDIMPUAN	75.22	75.48	76.05	76.44	76.93	77.19	77.73	78.10
KOTA GUNUNG SITOLI	69.31	69.61	70.23	70.68	70.22	70.51	71.11	71.55

Lampiran 3. Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara,
2020-2023

KABUPATEN/KOTA	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
	2020	2021	2022	2023
NIAS	12.57	12.84	13.04	13.30
MANDAILING NATAL	13.32	13.61	13.85	13.86
TAPANULI SELATAN	13.24	13.35	13.37	13.58
TAPANULI TENGAH	13.06	13.07	13.24	13.49
TAPANULI UTARA	13.69	13.70	13.72	13.73
TOBA SAMOSIR	13.45	13.46	13.58	13.59
LABUHAN BATU	12.73	12.74	12.95	13.25
ASAHAN	12.60	12.61	12.63	12.64
SIMALUNGUN	12.78	12.79	12.81	12.82
DAIRI	13.10	13.11	13.24	13.32
KARO	12.76	12.77	12.95	13.25
DELI SERDANG	13.35	13.36	13.38	13.39
LANGKAT	13.05	13.24	13.26	13.27
NIAS SELATAN	12.23	12.27	12.48	12.78
HUMBANG HASUNDUTAN	13.28	13.29	13.31	13.32
PAKPAK BARAT	13.86	13.87	13.89	13.90
SAMOSIR	13.47	13.48	13.50	13.51
SERDANG BEDEGAI	12.60	12.61	12.63	12.64
BATU BARA	12.63	12.64	12.93	13.11
PADANG LAWAS UTARA	12.87	13.04	13.23	13.53
PADANG LAWAS	13.03	13.27	13.41	13.70
LABUHAN BATUSELATAN	13.00	13.01	13.12	13.42
LABUHAN BATU UTARA	13.04	13.19	13.29	13.57
NIAS UTARA	13.03	13.04	13.06	13.36
NIAS BARAT	12.94	12.95	12.97	12.98
KOTA SIBOLGA	13.16	13.28	13.30	13.42
KOTA TANJUNG BALAI	12.50	12.62	12.90	13.14
KOTA PEMATANGSIANTAR	14.45	14.57	14.59	14.60
KOTA TEBING TINGGI	12.72	12.73	12.91	13.12
KOTA MEDAN	14.74	14.75	14.77	14.78
KOTA BINJAI	13.62	13.63	13.87	14.17
KOTA PADANGSIDEMPUAN	14.54	14.56	14.58	14.59
KOTA GUNUNG SITOLI	13.74	13.75	13.77	13.78

Lampiran 4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020-2023

KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			
	2020	2021	2022	2023
NIAS	5.36	5.64	5.88	6.14
MANDAILING NATAL	8.62	8.63	8.76	8.84
TAPANULI SELATAN	9.28	9.29	9.34	9.51
TAPANULI TENGAH	8.62	8.84	8.86	8.87
TAPANULI UTARA	9.85	9.99	10.00	10.09
TOBA SAMOSIR	10.52	10.57	10.58	10.59
LABUHAN BATU	9.24	9.25	9.40	9.49
ASAHAN	8.79	8.80	8.82	8.83
SIMALUNGUN	9.60	9.61	9.63	9.72
DAIRI	9.58	9.59	9.72	9.88
KARO	9.79	10.00	10.02	10.03
DELI SERDANG	10.09	10.10	10.27	10.28
LANGKAT	8.65	8.66	8.68	8.73
NIAS SELATAN	5.85	6.06	6.23	6.48
HUMBANG HASUNDUTAN	9.54	9.71	10.00	10.01
PAKPAK BARAT	9.03	9.14	9.39	9.61
SAMOSIR	9.43	9.44	9.46	9.47
SERDANG BEDEGAI	8.54	8.69	8.71	8.85
BATU BARA	8.06	8.07	8.26	8.50
PADANG LAWAS UTARA	9.37	9.38	9.46	9.55
PADANG LAWAS	9.01	9.02	9.31	9.43
LABUHAN BATUSELATAN	8.75	8.90	8.92	8.93
LABUHAN BATU UTARA	8.40	8.41	8.64	8.87
NIAS UTARA	6.58	6.77	6.78	6.85
NIAS BARAT	6.49	6.69	6.97	7.07
KOTA SIBOLGA	10.40	10.41	10.43	10.44
KOTA TANJUNG BALAI	9.44	9.45	9.55	9.68
KOTA PEMATANGSIANTAR	11.16	11.29	11.31	11.58
KOTA TEBING TINGGI	10.31	10.44	10.65	10.86
KOTA MEDAN	11.39	11.48	11.50	11.62
KOTA BINJAI	10.93	10.94	11.18	11.19
KOTA PADANGSIDEMPUAN	11.00	11.09	11.11	11.12
KOTA GUNUNG SITOLI	8.61	8.62	8.64	8.65

Lampiran 5. Umur Harapan Hidup (UHH) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020-2023

KABUPATEN/KOTA	UHH (SP2010)				UHH (LF SP2020)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
NIAS	69.75	69.78	70.06	70.34	71.27	71.29	71.52	71.74
MANDAILING NATAL	62.60	62.65	63.05	63.47	70.95	71.00	71.35	71.72
TAPANULI SELATAN	64.91	64.97	65.28	65.56	71.00	71.06	71.35	71.61
TAPANULI TENGAH	67.15	67.24	67.58	67.90	71.07	71.16	71.47	71.76
TAPANULI UTARA	68.63	68.76	69.16	69.57	73.35	73.48	73.85	74.10
TOBA SAMOSIR	70.08	70.29	70.76	71.24	73.44	73.64	74.07	74.22
LABUHAN BATU	69.93	69.95	70.37	70.77	72.20	72.21	72.55	72.88
ASAHAN	68.26	68.37	68.73	69.09	72.64	72.74	73.07	73.39
SIMALUNGUN	71.22	71.37	71.78	72.20	73.21	73.34	73.70	74.08
DAIRI	69.00	69.19	69.64	70.11	73.35	73.53	73.94	74.13
KARO	71.40	71.58	72.03	72.28	73.44	73.64	74.14	74.16
DELI SERDANG	71.73	71.77	72.07	72.31	73.13	73.17	73.44	73.65
LANGKAT	68.80	68.97	69.39	69.64	73.35	73.54	74.02	74.14
NIAS SELATAN	68.74	68.86	69.21	69.58	70.88	70.98	71.29	71.61
HUMBANG	69.27	69.51	70.02	70.27	73.31	73.60	73.82	74.07
HASUNDUTAN	69.27	69.51	70.02	70.27	73.31	73.60	73.82	74.07
PAKPAK BARAT	65.74	65.96	66.44	66.89	71.46	71.68	72.16	72.61
SAMOSIR	71.27	71.41	71.82	72.24	73.31	73.44	73.80	74.10
SERDANG BEDEGAI	68.68	68.82	69.21	69.59	72.27	72.40	72.76	73.11
BATU BARA	66.96	67.13	67.55	67.88	71.68	71.86	72.29	72.63
PADANG LAWAS UTARA	67.17	67.22	67.53	67.82	71.00	71.04	71.32	71.57
PADANG LAWAS	67.09	67.13	67.43	67.71	70.98	71.01	71.27	71.52
LABUHAN BATUSELATAN	68.71	68.81	69.16	69.54	71.76	71.84	72.14	72.46
LABUHAN BATU UTARA	69.46	69.56	69.91	70.25	73.41	73.50	73.81	74.06
NIAS UTARA	69.43	69.55	69.90	70.24	71.39	71.50	71.81	72.12
NIAS BARAT	68.96	69.08	69.43	69.96	71.56	71.65	71.91	72.30
KOTA SIBOLGA	69.01	69.25	69.77	70.18	72.97	73.21	73.75	74.02
KOTA TANJUNG BALAI	63.27	63.44	63.87	64.28	73.08	73.25	73.70	74.01
KOTA PEMATANGSIANTAR	73.55	73.77	74.25	74.75	73.55	73.77	74.27	74.75
KOTA TEBING TINGGI	70.87	70.95	71.29	71.63	73.42	73.49	73.78	74.07
KOTA MEDAN	73.14	73.23	73.58	73.93	73.81	73.97	74.32	74.76
KOTA BINJAI	72.38	72.45	72.79	73.13	73.55	73.62	73.92	74.18
KOTA PADANG SIDIMPUAN	69.41	69.50	69.84	70.20	72.86	72.93	73.23	73.54
KOTA GUNUNG SITOLI	71.19	71.32	71.71	72.09	73.22	73.34	73.69	74.03

Lampiran 6. Pengeluaran Riil per Kapita menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020-2023

KABUPATEN/KOTA	Pengeluaran Riil per Kapita (Juta Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
NIAS	6,898	6,995	7,196	7,301
MANDAILING NATAL	9,684	9,771	10,061	10,251
TAPANULI SELATAN	11,236	11,304	11,727	11,829
TAPANULI TENGAH	10,071	10,138	10,495	10,690
TAPANULI UTARA	11,648	11,710	11,892	12,115
TOBA SAMOSIR	12,154	12,224	12,475	12,676
LABUHAN BATU	11,150	11,212	11,474	11,670
ASAHAN	10,890	11,030	11,515	11,795
SIMALUNGUN	11,308	11,376	11,524	11,746
DAIRI	10,350	10,504	10,740	10,969
KARO	12,349	12,412	12,554	12,779
DELI SERDANG	12,225	12,291	12,657	12,890
LANGKAT	11,071	11,142	11,439	11,632
NIAS SELATAN	6,974	7,041	7,195	7,299
HUMBANG HASUNDUTAN	7,850	8,016	8,250	8,476
PAKPAK BARAT	8,170	8,254	8,558	8,764
SAMOSIR	8,422	8,504	8,991	9,158
SERDANG BEDEGAI	10,950	11,017	11,499	11,695
BATU BARA	10,410	10,539	10,755	10,933
PADANG LAWAS UTARA	9,987	10,055	10,447	10,615
PADANG LAWAS	8,807	8,921	9,207	9,395
LABUHAN BATUSELATAN	11,495	11,562	11,751	11,950
LABUHAN BATU UTARA	11,779	11,840	12,258	12,429
NIAS UTARA	6,064	6,155	6,575	6,788
NIAS BARAT	5,830	5,924	6,152	6,382
KOTA SIBOLGA	11,473	11,540	12,135	12,285
KOTA TANJUNG BALAI	11,132	11,225	11,589	11,753
KOTA PEMATANGSIANTAR	12,372	12,436	12,744	12,984
KOTA TEBING TINGGI	12,876	12,939	13,144	13,385
KOTA MEDAN	14,890	14,999	15,503	15,674
KOTA BINJAI	10,997	11,063	11,358	11,567
KOTA PADANGSIDEMPUAN	10,856	10,965	11,337	11,552
KOTA GUNUNG SITOLI	7,980	8,134	8,434	8,635

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MEDAN
BPS- Statistics of Medan Municipality

Jl. Gaperta No. 311 Medan, 20214

Telp: (061) 8449285, Fax: (061) 8449270

E-mail : bps1275@bps.go.id

ISSN 3025-7298



9

773025

729003

